

Mesir dan BRICS: Analisis Kepentingan Ekonomi Nasional di Era Presiden El-Sisi

Egypt and BRICS: An Analysis of National Economic Interest in the Era of President El-Sisi

Ulfianti^{1*}, Hamdan Basyar²

Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia¹ *

Badan Riset dan Inovasi Nasional²

Email Korespondensi: ulfianti@ui.ac.id *

Diterima 27 Januari 2026 | Direvisi 27 Mei 2026 | Diterbitkan 1 Juni 2026

ABSTRACT

This article analyzes how Egypt's membership in BRICS supports national economic interests in the era of President Abdel Fattah el-Sisi. The 21st century is marked by a shift in global economic power from the West toward developing countries, with BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) emerging as an influential economic bloc. This study employs Rational Choice Theory and a qualitative approach, drawing on secondary data, including academic literature, policy documents, and reports from international institutions. The findings indicate that Egypt's membership in BRICS provides access to investment, technology, trade, and alternative financing through the New Development Bank (NDB). The strategic position of the Suez Canal enables economic diversification, infrastructure development, and the strengthening of the tourism sector. This strategy aligns with Egypt's Vision 2030 and President El-Sisi's priorities to enhance economic stability and national self-reliance. Integration into BRICS expands South-South cooperation, strengthens trade and investment networks, and enhances Egypt's economic capacity and geopolitical influence in Africa, the Middle East, and global markets.

Keywords: BRICS, Economic, Egypt, National Interest, President El-Sisi

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis bagaimana keanggotaan Mesir dalam BRICS mendukung kepentingan ekonomi nasional pada era Presiden Abdel Fattah el-Sisi. Abad ke-21 ditandai oleh pergeseran kekuatan ekonomi global dari Barat ke negara-negara berkembang, dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) sebagai blok ekonomi yang berpengaruh. Penelitian ini menggunakan Rational Choice Theory dan metode kualitatif berbasis data sekunder, termasuk literatur akademik, dokumen kebijakan, serta laporan dari lembaga internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa keanggotaan Mesir dalam BRICS membuka akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan pembiayaan alternatif melalui New Development Bank (NDB). Posisi strategis Terusan Suez memungkinkan diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor pariwisata. Strategi ini sejalan dengan Visi 2030 Mesir dan prioritas el-Sisi untuk

meningkatkan stabilitas ekonomi serta kemandirian nasional. Integrasi dalam BRICS memperluas kerja sama Selatan-Selatan, memperkuat jaringan perdagangan dan investasi, serta meningkatkan kapasitas ekonomi dan pengaruh geopolitik Mesir di Afrika, Timur Tengah, dan pasar global.

Kata kunci: BRICS, Ekonomi, Kepentingan Nasional, Mesir, Presiden El-Sisi

PENDAHULUAN

Abad ke-21 ditandai oleh perkembangan ekonomi global yang dinamis, yang menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi terpusat pada negara Barat, melainkan tersebar ke negara-negara berkembang yang muncul sebagai kekuatan ekonomi non-Barat (Megre & Ribeiro, 2024). Hal tersebut mencerminkan multipolarisasi dunia. Fenomena pergeseran kekuatan dari blok Barat ke non-Barat terlihat jelas melalui peran BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) yang telah menjadi blok ekonomi berpengaruh di panggung internasional dengan memperkuat posisi anggotanya melalui investasi, perdagangan, proyek infrastruktur, dan lembaga seperti *New Development Bank* (NDB) (Chatterjee & Naka, 2022).

Ekonomi negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) tumbuh, dengan pangsa output global naik dari 5,85% menjadi 21,6% dan PDB kumulatif mencapai \$14,9 triliun, sehingga menyumbang lebih dari 25% output global hingga 2023 (Nach & Ncwadi, 2024). Melalui lembaga seperti *New Development Bank* dan *Contingent Reserve Arrangement*, serta ekspansi 2023 yang memasukkan Arab Saudi, Mesir, Ethiopia, Iran, dan UEA untuk menjadi anggota BRICS dapat memperkuat kerja sama ekonomi, pembangunan, dan stabilitas keuangan. Kehadiran BRICS juga mendorong pergeseran pola perdagangan dan investasi di Timur Tengah dan Afrika Utara, membuka peluang diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada aliansi Barat, serta memperluas akses terhadap sumber daya, teknologi, dan kemitraan strategis yang mendukung pertumbuhan regional dan penguatan posisi geopolitik (Ahmad et al., 2024). Mesir salah satu negara yang memanfaatkan eksistensi BRICS untuk kerjasama ekonomi nasionalnya untuk mengamankan pendanaan dan investasi bagi ekonomi nasional, selain dari AS, Uni Eropa, dan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, terutama *New Development Bank* (NDB). *New Development Bank* (NDB) menawarkan alternatif sumber pembiayaan untuk proyek infrastruktur, energi terbarukan, dan pembangunan berkelanjutan (Patrick, 2025).

Mesir memutuskan untuk menjadi anggota BRICS sepenuhnya pada Agustus 2023, Selain dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan, bergabungnya Mesir dalam blok ini membuka peluang untuk memperkuat diversifikasi ekonomi, menarik investasi asing, dan memperluas

jaringan perdagangan global, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi Mesir di Timur Tengah dan Afrika Utara (Mansour, 2024). Diversifikasi ekonomi di Mesir tersebut sejalan dengan Presiden Abdel Fattah el-Sisi untuk mengurangi ketergantungan dengan Barat sehingga di bawah kepemimpinan el-Sisi BRICS menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri dan domestik Mesir dengan melibatkan pihak pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ekonomi, dan Kementerian Keuangan Mesir sebagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ekonomi domestik yang sedang melemah melalui Keputusan Presiden No. 628 of 2022 yang berisikan persetujuan secara resmi dari Parlemen Mesir terkait bergabungnya Mesir ke dalam *New Development Bank* yang dibentuk oleh BRICS itu sendiri dan mengatur keikutsertaan Mesir sebagai anggota BRICS (Bachtiar, 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam 15 tahun terakhir, BRICS telah muncul sebagai aktor penting dalam multilateralisme ekonomi global. Tulisan Kirton & Larionova (2022) menyoroti bahwa sejak KTT BRIC pertama pada 2009 hingga masuknya Afrika Selatan pada 2010, blok ini berhasil membangun dinamika kelembagaan yang kuat melalui KTT tahunan, jaringan *people-to-people*, dan hampir 60 institusi intra-blok. Dengan lebih dari 933 keputusan kolektif dan tingkat kepatuhan rata-rata 77%, BRICS menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan mencapai konsensus meski menghadapi ketegangan domestik, pandemi COVID-19, serta krisis sosial-ekonomi.

Tulisan Nach & Newadi (2024) menambahkan bahwa masih ada disparitas ekonomi dan sosial, kompleksitas heterogenitas anggota BRICS, serta guncangan global yang menuntut harmonisasi kebijakan yang lebih mendalam, serta penelitian lanjutan untuk menilai kelayakan integrasi BRICS, potensi mata uang bersama (*optimum currency area*), serta dampaknya terhadap sistem ekonomi global.

Kemudian, Doorgapersad (2022) menambahkan bahwa BRICS memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan memperkuat tata kelola global, terutama melalui kemitraan antaranggota serta peran mereka dalam forum G20. Meskipun BRICS menghadapi tantangan internal seperti disparitas politik, sosial, dan ekonomi, serta ketergantungan pada birokrasi dan praktik korupsi, Siddiqui (2024) dan Özekin & Sune (2023) melihat bahwa kelompok ini memiliki potensi untuk mengembangkan strategi kolektif serta kerja sama antaranggota. Mereka juga menunjukkan bahwa kebangkitan BRICS menandai pergeseran menuju tatanan multipolar, dengan negara-negara Global Selatan semakin berpengaruh dalam sistem keuangan dan ekonomi global; misalnya, China memainkan peran sentral dalam dinamika BRICS. Horesh (2021) dan Wang et al. (2022) menyoroti strategi Tiongkok yang

menggabungkan kekuatan ekonomi, diplomasi, dan intervensi negara dalam BRICS, sehingga menjadikannya motor penggerak kerja sama ekonomi Selatan–Selatan. Chatterjee & Naka (2022) juga menekankan dampak BRICS terhadap geografi ekonomi global, politik populis, dan aliansi Selatan–Selatan, meskipun ketimpangan domestik dan eksklusi sosial tetap menjadi kendala.

Pascarevolusi 2011, Mesir menghadapi tantangan domestik maupun eksternal. Selim (2022) mengidentifikasi kebijakan luar negeri Mesir pasca-2011 untuk mengidentifikasi pola kesinambungan dan perubahan, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Selama periode SCAF dan pemerintahan Morsi, unsur kesinambungan lebih dominan, mencerminkan pelestarian warisan “Mubarakisme” serta subordinasi terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, meskipun sentimen revolusioner sedang tinggi. Pergeseran paling signifikan terjadi pada era al-Sisi, dengan orientasi strategis yang bergeser ke Rusia dan Tiongkok, serta penyesuaian hubungan dengan AS.

Selain itu, penulis juga perlu melihat kebijakan luar negeri Mesir di bawah kepemimpinan El Sisi dengan menyoroti tulisan Kadirova (2024) yang dipengaruhi oleh faktor geopolitik, posisi regional, dan identitas Islam, serta arah strategis yang diwakili oleh “lingkaran-lingkaran” Arab, Afrika, Islam, Asia, Eropa, dan internasional. Di bawah Presiden A.F. el-Sisi, kebijakan luar negeri lebih dipandu oleh kepentingan elit militer-politik daripada kepentingan nasional semata, dengan perubahan signifikan yang dipicu oleh konfrontasi dengan Ikhwanul Muslimin dan penyesuaian hubungan regional, termasuk penguatan hubungan dengan Arab Saudi dan UEA, serta meningkatnya ketegangan dengan Turki, Qatar, dan Iran. Pennaforte & Santos (2024) menegaskan bahwa orientasi Mesir sebagai *bridge state* memungkinkan negara ini menjaga otonomi dan keamanan nasional, sekaligus memperkuat kapasitasnya dalam menghadapi tekanan global.

Yefet & Lavie (2021) menyoroti otoritarianisme di bawah kepemimpinan El-Sisi pasca-Revolusi 2011, termasuk legitimasi personal, misioner, dan eudaimonik. Rezim menolak legitimasi revolusioner dan demokratis tahun 2011, menggantinya dengan wacana yang menekankan hak sosial-ekonomi sambil menekan oposisi. Meskipun legitimasi eudaimonik mencerminkan hubungan timbal balik dengan masyarakat, represi dan reformasi ekonomi yang keras membatasi kemampuan rezim untuk sepenuhnya mempertahankan stabilitas politik.

Kaitan Mesir dengan BRICS terutama terlihat melalui orientasi strategis terhadap Tiongkok, Rusia, dan India. Pengalaman negara lain, seperti Indonesia. Bakti et al. (2025) menemukan bahwa keterlibatan dengan BRICS dapat meningkatkan perdagangan, investasi,

dan diplomasi ekonomi, termasuk melalui ekspor nonmigas dan surplus perdagangan. Mesir berupaya memanfaatkan mekanisme finansial BRICS, seperti NDB, untuk pembangunan infrastruktur dan diversifikasi ekonomi, sehingga mendukung kepentingan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi geopolitik.

Namun, keterbatasan pertumbuhan ekonomi dan disparitas antaranggota BRICS (Agarwal & Kumar, 2023; Doorgapersad, 2022) menandai perlunya strategi yang lebih selektif. Mesir tampaknya mengadopsi pendekatan pragmatis, memaksimalkan peluang ekonomi dari negara-negara BRICS yang tumbuh pesat, sambil tetap menjaga keseimbangan dengan kekuatan global lainnya, terutama Barat (Siddiqui, 2024; Özekin & Sune, 2023).

Secara keseluruhan, era al-Sisi ditandai oleh strategi domestik yang otoritarian dan diversifikasi kemitraan global, dengan memanfaatkan peluang BRICS sebagai instrumen ekonomi dan geopolitik. Pendekatan ini memungkinkan Mesir mengoptimalkan kepentingan nasional, memperkuat pengaruh regional, dan menyesuaikan diri dengan dinamika multipolar global. Maka dari itu, penulis mengidentifikasi adanya gap penelitian terkait hubungan Mesir dengan BRICS, khususnya dalam konteks strategi ekonomi nasional pada era al-Sisi. Meski literatur telah membahas integrasi BRICS secara global maupun kebijakan luar negeri Mesir secara terpisah, studi yang secara komprehensif menganalisis bagaimana Mesir memanfaatkan BRICS untuk mengoptimalkan kepentingan ekonomi nasional, memperkuat posisi regional, dan menghadapi dinamika multipolar masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah interaksi antara kebijakan domestik, strategi luar negeri, dan peluang ekonomi yang muncul dari keterlibatan Mesir dalam BRICS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Neumann (2014), penelitian kualitatif digambarkan sebagai rincian yang membahas orang, tindakan, dan peristiwa dalam kehidupan sosial, di mana pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui teks dalam dokumen, catatan observasi, wawancara, artefak fisik, audio atau video, serta gambar atau foto (Neumann, 2014). Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dijabarkan oleh Creswell (2014) untuk memberikan gambaran fenomena dalam penelitian yang diteliti secara faktual, kemudian dianalisis secara mendalam keterkaitan antarfenomena antara keanggotaan Mesir dalam BRICS dan upaya pemenuhan kepentingan ekonomi nasional pada era pemerintahan Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah fenomena kerja sama

multilateral tidak hanya sebagai proses ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi kebijakan negara dalam merespons dinamika ekonomi global.

Penelitian ini memposisikan Mesir sebagai studi kasus utama untuk mengkaji bagaimana kebijakan ekonomi dan orientasi kerja sama internasional dapat dimanfaatkan guna memperkuat kapasitas ekonomi nasional. Pengumpulan data diperoleh melalui sumber sekunder sesuai dengan penjelasan Kumar (2011) bahwa sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh melalui pendekatan kedua, adapun contoh sumber yang dimaksud ialah artikel, jurnal, majalah, dan buku (Kumar, 2011). Maka dari itu, sumber data penelitian ini diperoleh melalui publikasi akademik, dokumen kebijakan pemerintah Mesir, laporan resmi BRICS dan *New Development Bank*, serta laporan lembaga internasional yang relevan. Kemudian, data yang terkumpul akan dianalisis melalui proses pengelompokan tematik dan interpretasi kritis untuk mengidentifikasi pola, kepentingan, serta implikasi ekonomi dan geopolitik dari keanggotaan Mesir dalam BRICS.

PEMBAHASAN

Peran BRICS

BRICS terbentuk pada 2009 sebagai upaya untuk menyatukan negara-negara berkembang dari berbagai benua. Awal mulanya terbentuk BRICS, dimulai dengan adanya pertemuan para pemimpin negara tersebut dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana yang diselenggarakan di Rusia pada tahun 2009. Dalam forum tersebut, para pemimpin BRICS menegaskan komitmen bersama untuk membangun arsitektur ekonomi global yang lebih demokratis dan transparan, serta mendukung upaya Kelompok G20 dalam mereformasi lembaga-lembaga keuangan internasional (*International Financial Institutions/IFIs*) dan mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi global (Kirton & Larionova, 2022). Selain itu, BRIC juga berkomitmen untuk memperdalam kerja sama internal guna memperjuangkan kepentingan negara-negara pasar berkembang dan negara-negara berkembang melalui bidang perekonomian dengan berbagai sektor seperti, perdagangan, keuangan, energi, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, pertanian, serta pendidikan.

Lima belas tahun setelah BRICS dibentuk, tentunya kelompok kerja sama negara berkembang dalam transformasi perekonomian global melakukan beberapa langkah strategis, yaitu mendorong pembaruan tata kelola internasional yang menjunjung tinggi prinsip multilateralisme, menegaskan kepatuhan terhadap norma dan aturan internasional, serta memperkuat sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, terbuka, transparan,

inklusif, dan bebas dari diskriminasi, serta menolak praktik unilateralisme (Zhongxiu & Qingxin, 2020).

Dijelaskan oleh salah satu akademisi yaitu Rodrigo Cezar seorang dosen Hubungan Internasional di Getulio Vargas BRICS menyampaikan bahwa negara - negara yang berada di dalam pusaran ketidakstabilan ekonomi global dengan mengandalkan stimulus fiskal domestik dalam skala besar untuk meredam dampak konflik dan perang tarif (Souto & Villamil, 2025). Seiring dengan agenda BRICS, yaitu memperdalam kerja sama perdagangan dan investasi melalui pembentukan kemitraan Revolusi Industri Baru (PartNIR), hal ini juga menjadi langkah penting untuk memperkuat keterhubungan rantai industri global dari hulu hingga hilir. Secara empiris, juga ditunjukkan bahwa kontribusi BRICS terhadap perekonomian dunia kini jauh melampaui kelompok G7, yang pangsa ekonominya berada pada kisaran 28% (Zhongxiu & Qingxin, 2020).

Kepentingan Aktor

Ketika el-Sisi naik menjadi presiden Mesir pada 2013, hal itu menandai dimulainya babak ketidakpastian baru di negara tersebut akibat perubahan kepemimpinan. Selain adanya perbedaan pendapat di komunitas internasional mengenai jalannya proses politik yang akan mengakhiri pengalaman pertama Mesir dengan pemerintahan sipil, pemerintah menghadapi tantangan domestik berupa hubungan yang tidak stabil dengan oposisi yang dipimpin oleh Ikhwanul Muslimin, serta tekanan untuk mempertahankan tatanan neoliberalisme di tengah berbagai masalah struktural dan siklus dalam ekonomi (Kadirova, 2024). Dalam konteks *Rational Choice Theory*, pemerintah Mesir di bawah Presiden el-Sisi bertindak sebagai aktor rasional yang mengejar kepentingan nasionalnya, khususnya untuk memperkuat perekonomian nasional. Situasi ini semakin menekankan peran penting hubungan luar negeri sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas internal pasca-Arab *Spring*. Mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu kepentingan utama el-Sisi dalam kepemimpinannya. Bergabungnya Mesir dalam keanggotaan BRICS dapat dipahami sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan pertumbuhan perekonomian domestik karena organisasi tersebut terdiri dari kekuatan ekonomi yang berkembang pesat, seperti, China, Rusia, Brasil, India, dan Afrika Selatan yang memberikan akses pada investasi, teknologi, perdagangan, dan peluang kerja sama pembangunan. Bahkan, Mesir memandang hubungan dengan China sebagai saling menguntungkan dan berpotensi membantu Kairo mencapai kepentingan nasionalnya, baik dari perspektif ekonomi maupun strategis (Kandil, 2024).

Jika dilihat secara geografis, Mesir menempatkan posisi yang strategis dengan adanya keberadaan Terusan Suez, yang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah serta menjadi gerbang menuju Samudra Hindia, terletak di persimpangan tiga benua; Afrika, Asia, dan Eropa sehingga memegang peran krusial dalam perdagangan global sebagai jalur tercepat bagi kapal-kapal dagang modern. Sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Mesir, terusan ini juga menjadi titik sempit geopolitik utama, penting bagi perdagangan minyak dunia dan pergerakan angkatan laut di Teluk Persia serta Laut Arab (Chorev, 2023). Melalui BRICS, Mesir dapat memanfaatkan hubungan dengan China dan Rusia untuk mendapatkan investasi infrastruktur, teknologi, dan energi, yang relevan dengan tujuan domestik Al-Sisi: meningkatkan pembangunan ekonomi, modernisasi militer, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, ekspansi China melalui BRICS di Afrika menunjukkan tren volume perdagangan yang meningkat secara dramatis, Hal tersebut karena China menjadi mitra dagang terbesar senilai sekitar 254 miliar dolar AS pada tahun 2022 di Afrika (Kaura, 2024). Eksistensi China sebagai anggota BRICS juga bisa dimanfaatkan oleh Mesir sebagai mitra dagang untuk kerja sama dalam sektor perdagangan untuk memperluas produk Mesir domestik di pasar internasional dan sejalan dengan kebijakan utama el-Sisi pada saat awal kepemimpinannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Strategi Pemerintah Mesir

Melalui kerangka berpikir *rational choice theory*, strategi Pemerintah Mesir untuk bergabung BRICS dengan melihat Kerjasama Selatan-Selatan oleh negara berkembang dan sebagai wadah untuk memperluas jaringan perdagangan dan investasi, serta memperkuat pengaruh geopolitik di Afrika, Timur Tengah, dan dunia Arab, menariknya Mesir memiliki posisi sebagai satu-satunya negara dengan identitas Afrika, Arab, dan Timur Tengah untuk memanfaatkan peluang lokasi geografis strategis di Terusan Suez, biaya tenaga kerja rendah, serta produk primer seperti buah-buahan, kapas, dan pupuk fosfat, memungkinkan negara ini menjadi hub ekonomi dan logistik penting bagi investasi BRICS. Investasi strategis dari Tiongkok (CSCEC), Rusia (PLTN El Dabaa), dan India (pusat logistik, lini produksi vaksin, dan manufaktur elektronik) menunjukkan bagaimana modal, teknologi, dan tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan kapasitas industri, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Zona Ekonomi TEDA Suez mengilustrasikan sinergi keunggulan komparatif yang menghasilkan efek “1+1>2”, yang artinya, dengan adanya kerja sama serta kolaborasi antara Mesir dan negara BRICS lainnya, akan memberikan nilai tambah

dalam pemanfaatan ekonomi, seperti peningkatan ekspor, investasi yang terkumpul lebih dari 1,6 miliar USD, dan puluhan ribu pekerjaan yang tercipta. Selain itu, BRICS memberikan Mesir alternatif pendanaan yang lebih stabil dibandingkan dengan bantuan IMF atau AS, sehingga mengurangi risiko nilai tukar dan tekanan eksternal (Xie, 2025).

Keanggotaan Mesir dalam BRICS selaras dengan Visi 2030 Mesir karena menekankan pembangunan berkelanjutan dan diversifikasi ekonomi. Secara strategis, BRICS menyediakan pasar bersama yang memungkinkan Mesir mempromosikan barang dan produk domestiknya, membuka pasar baru, serta memperkuat devisa nasional, sehingga mendukung strategi diversifikasi hubungan perdagangan internasional. Selain itu, Mesir dapat memanfaatkan *New Development Bank* (NDB) untuk mendanai proyek-proyek penting di sektor infrastruktur, energi, transportasi, air, komunikasi, kesehatan, dan pariwisata, sehingga dapat mempercepat modernisasi ekonomi serta meningkatkan kapasitas nasional. Selain itu, negara-negara BRICS, khususnya China dan India, yang merupakan pasar wisata luar negeri yang besar dan terus berkembang, memberikan peluang bagi Mesir untuk menerima investasi langsung di sektor pariwisata, termasuk pembangunan hotel, resor, dan infrastruktur pendukung pariwisata (Eldeen et al., 2025). Kemitraan usaha patungan (*joint ventures*) antara perusahaan pariwisata Mesir dan mitra BRICS berpotensi meningkatkan kualitas layanan serta menarik lebih banyak wisatawan. Para ahli menekankan bahwa keanggotaan Mesir di BRICS bersifat menguntungkan, memperkuat investasi, dan memperluas kerja sama lintas sektor, sehingga sektor pariwisata menjadi pilar strategis dalam upaya Mesir menarik modal asing, meningkatkan devisa, dan menciptakan dampak ekonomi.

Pilihan Pemerintah Mesir

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, Pemerintah Mesir merupakan aktor rasional yang mengejar kepentingan nasional Mesir dengan bergabungnya Mesir dalam kelompok kerja sama ekonomi negara-negara berkembang. Peningkatan ekonomi melalui pembangunan berkelanjutan, pasar wisata, dan akses Mesir ke *New Development Bank* yang tanpa memenuhi syarat seperti di *International Monetary Fund*, yang menjadi skala prioritas pertumbuhan ekonomi Mesir di BRICS. Kemudian, penulis menemukan bahwa bergabungnya Mesir sebagai anggota BRICS dapat membuka peluang hubungan bilateral dengan negara-negara lain, termasuk dalam konteks rivalitas antara Mesir dan Ethiopia.

Permasalahan antara Mesir dan Ethiopia berawal dari Sungai Nil, yang merupakan sumber air utama bagi Mesir, menyediakan sekitar 97% kebutuhan air negara tersebut, dan

sejak zaman kuno, teks seperti Hymne Kheti menunjukkan kesadaran awal tentang pemanfaatan sumber daya secara bersama. Saat ini, pembagian air Nil hanya diatur melalui Perjanjian 1959 antara Mesir dan Sudan, yang memberikan Mesir 55 miliar meter kubik per tahun tanpa melibatkan negara hulu seperti Ethiopia, sehingga menimbulkan ketegangan terkait distribusi yang adil. Mesir dan Sudan mendasarkan klaim kedaulatan atas Nil pada prinsip *res communis*, akresi, dan preskripsi, meskipun pembangunan Bendungan Besar Ethiopia (GERD) mengurangi sedimentasi dan berpotensi mengancam hak historis mereka (Lilienthal et al., 2023). Secara hukum, perjanjian lama hanya mengikat Mesir dan Sudan, sedangkan negara non-pihak seperti Ethiopia tidak terikat (*pacta tertiis nec nocent prosunt*). Sementara itu, prinsip hukum internasional modern melalui Konvensi PBB 1997 menekankan pemanfaatan air secara adil dan kewajiban untuk mencegah kerugian bagi negara lain, meskipun konvensi ini belum diratifikasi oleh negara-negara di DAS Nil. Dengan demikian, isu utama mencakup ketidakmerataan distribusi air, sengketa kedaulatan antara negara hulu dan hilir, serta dampak pembangunan bendungan, sehingga penyelesaian yang adil dan komprehensif belum tercapai (Lilienthal et al., 2023).

Relevansi permasalahan geopolitik yang dihadapi antara Mesir - Ethiopia dan BRICS di atas menunjukkan bahwa preferensi Mesir dalam meningkatkan stabilitas ekonomi domestiknya dengan memanfaatkan menjalin kemitraan bilateral dengan Ethiopia terkait pengelolaan Sungai Nil dan proyek pembangunan regional, serta menjalankan diplomasi regional untuk menurunkan ketegangan dengan negara tetangga seperti Somalia dan Somaliland. Keanggotaan kedua negara pada Agustus 2023 menandai momen penting dalam diplomasi, termasuk pertemuan bilateral antara Presiden el-Sisi dan Perdana Menteri Abiy Ahmed untuk membahas GERD. Pertemuan keanggotaan tersebut menandai langkah diplomasi penting, namun negosiasi GERD gagal setelah empat bulan dan hubungan ekonomi tetap lemah, dengan volume perdagangan fluktuatif antara \$99,5–168,4 juta (2019–2023), tampaknya keanggotaan BRICS belum mampu secara signifikan meredakan rivalitas (Mansour & Baiche, 2025). Mesir tetap menggabungkan strategi multilateral dan bilateral secara rasional untuk mencapai stabilitas ekonomi, memperluas akses terhadap modal dan pasar, serta memperkuat posisi geopolitik di Afrika dan Timur Tengah.

Tantangan Mesir dalam Bergabung BRICS

Sebagai aktor yang rasional, selain mempertimbangkan manfaat, tentunya juga mempertimbangkan dimensi normatif dengan melihat apakah hasil yang dicapai sesuai dengan

tujuan Pemerintah Mesir, atau apakah ada tantangan, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik serta aktor-aktor non-BRICS yang muncul dalam kontestasi di tingkat regional untuk memengaruhi keputusan Mesir.

Pertama, di bawah kepemimpinan Presiden el-Sisi, Mesir telah memandang keanggotaan BRICS sebagai alat strategis untuk memperkuat kepentingan ekonomi nasional, termasuk akses terhadap pembiayaan alternatif melalui *New Development Bank* (NDB), diversifikasi perdagangan, serta percepatan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, Pemerintah Mesir mengalkulasi keuntungan dari jaringan ekonomi anggota BRICS, terutama China, Rusia, dan India, untuk investasi, teknologi, dan perdagangan, sambil mempertimbangkan sinergi dengan kebijakan domestik seperti Visi 2030. Namun, peluang ini dihadapkan pada posisi Mesir itu sendiri, di mana rivalitas regional dengan Ethiopia terkait GERD, keterbatasan peran BRICS dalam menyelesaikan sengketa air, serta potensi ketidaksesuaian kepentingan keamanan nasional Mesir dengan agenda beberapa anggota blok (Kandil, 2024). Strategi Mesir menunjukkan perhitungan rasional yang menekankan pemaksimalan keuntungan ekonomi dari keanggotaan BRICS sekaligus mitigasi risiko geopolitik, dengan tujuan menjaga stabilitas domestik serta memperkuat posisi Mesir di Afrika dan Timur Tengah.

Kedua, Pemerintah Mesir menghadapi sejumlah tantangan dalam keanggotaannya di BRICS terkait stabilitas ekonomi dan moneter. Fluktuasi nilai tukar pound terhadap dolar selama dekade terakhir menunjukkan kerentanan negara terhadap tekanan eksternal, termasuk volatilitas pasar global dan inflasi impor. Meskipun investasi dari negara-negara BRICS meningkat, tidak semua indikator ekonomi domestik menunjukkan perbaikan yang seimbang, karena hubungan negatif antara aset asing bersih dengan peluang ekspor, partisipasi ekonomi, dan rasio investasi BRICS terhadap total investasi asing (Khodary, et.al, 2024). Selain itu, ketergantungan pada penggunaan mata uang alternatif oleh BRICS meningkatkan risiko terhadap stabilitas moneter. Secara keseluruhan, pemerintah Mesir harus menerapkan strategi yang rasional, dengan menyeimbangkan manfaat ekonomi dari BRICS dengan risiko geopolitik dan keuangan yang melekat.

KESIMPULAN

Keanggotaan Mesir dalam BRICS sejak Agustus 2023 merupakan langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Abdel Fattah el-Sisi untuk memperkuat kepentingan ekonomi nasional sekaligus memperluas pengaruh geopolitik di Afrika, Timur

Tengah, dan dunia Arab. Dengan bergabung dalam blok negara berkembang ini, Mesir memperoleh akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, serta pembiayaan alternatif melalui *New Development Bank* (NDB), yang menawarkan fleksibilitas lebih dibandingkan dengan lembaga keuangan Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional, termasuk diversifikasi ekonomi, pengembangan infrastruktur, modernisasi sektor pertahanan, serta peningkatan kapasitas pariwisata dan industri manufaktur. Keunggulan strategis Mesir, khususnya Terusan Suez. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat peran negara sebagai hub logistik dan perdagangan global, serta membuka peluang sinergi dengan anggota BRICS utama seperti China, Rusia, dan India.

Meski demikian, Mesir menghadapi tantangan serius. Rivalitas dengan Ethiopia terkait *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) tetap menjadi isu geopolitik yang kompleks karena berdampak langsung pada keamanan pasokan air nasional. Upaya mediasi melalui BRICS belum berhasil menyelesaikan sengketa ini, yang menunjukkan keterbatasan forum multilateral dalam menangani konflik regional. Di sisi ekonomi, fluktuasi nilai tukar pound terhadap dolar mencerminkan kerentanan terhadap tekanan eksternal serta volatilitas pasar global. Hubungan negatif antara aset asing bersih dengan peluang ekspor, tingkat partisipasi ekonomi, dan rasio investasi BRICS terhadap total investasi asing menandakan bahwa investasi tidak selalu berdampak merata pada perekonomian domestik. Ketergantungan pada penggunaan mata uang alternatif oleh BRICS juga meningkatkan risiko terhadap stabilitas moneter.

Pemerintah Mesir bertindak sebagai aktor rasional yang memadukan strategi multilateral dan bilateral untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi, sekaligus mengelola risiko geopolitik dan finansial. Keanggotaan BRICS membuka peluang untuk memperluas jaringan perdagangan dan investasi global, meningkatkan kerja sama bilateral, serta menjalankan diplomasi regional untuk mengurangi ketegangan dengan negara tetangga seperti Somalia dan Somaliland. Langkah ini menunjukkan perhitungan strategis Mesir dalam menyeimbangkan pencapaian pertumbuhan ekonomi domestik, penguatan posisi geopolitik, dan mitigasi risiko internasional. Dengan demikian, integrasi ke BRICS berpotensi memperkuat kapasitas ekonomi dan diplomatik Mesir, meski tetap memerlukan manajemen risiko yang cermat untuk memastikan manfaat jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, M., & Kumar, S. (2023). BRICS Countries' Increasing Role in the world economy, Including Institutional Innovation. *BRICS Journal of Economics*, 4, 174 - 190. DOI 10.3897/brics-econ.4.e99451
- Ahmad, I., Haider, A., & Afzal, J. (2024). The Geopolitical and Economic Impact of BRICS on the Middle East. *FWU Journal of Social Sciences*, 18, 80 - 95. Retrieved 2025, from https://www.researchgate.net/profile/Aftab-Haider-3/publication/387663966_The_Geopolitical_and_Economic_Impact_of_BRICS_on_the_Middle_East/links/6776b2d0117f340ec3ee4829/The-Geopolitical-and-Economic-Impact-of-BRICS-on-the-Middle-East.pdf
- Bachtiar, R. S. (2025). Kebijakan Mesir Bergabung dengan BRICS Tahun 2024. *Global Insight Journal*, 02. <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.3138>
- Chatterjee, M., & Naka, I. (2022). Twenty years of BRICS: political and economic transformations through the lens of land. *Oxford Development Studies*, 50, 2 - 13. DOI: 10.1080/13600818.2022.2033191
- Chorev, S. (2023). The Suez Canal: Forthcoming Strategic and Geopolitical Challenges. *Palgrave Studies in Maritime Politics and Security*, 3 - 26. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15670-0_1
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Doorgapersad, S. V. (2022). The role of BRICS in global governance to promote economic development. *Africa's Public Service Delivery and Performance Review*. Retrieved 2025, from <https://doi.org/10.4102/apsdpr.v10i1.633>
- Eldeen, R. M. B., Ali, N. K., & Zaki, A. G. M. (2025). Impact Of Egypt's Accession to the BRICS Bloc: An Analytical Study on Egyptian Tourism Demand from the Point of View of Tourism and Economic Experts. *Journal of Tourism, Hotels and Heritage*. Retrieved 2025, from https://journals.ekb.eg/article_436015.html
- Eldeen, R. M. B., Ali, N. K., & Zaki, A. G. M. (2025). Impact Of Egypt's Accession to the BRICS Bloc: An Analytical Study on Egyptian Tourism Demand from the Point of View of Tourism and Economic Experts. *Journal of Tourism, Hotels and Heritage*. Retrieved 2025, from https://journals.ekb.eg/article_436015.html
- Horesh, N. (2021). China's Grand Strategy Under Xi Jinping. In (pp. 1 - 11). Routledge.
- Kadirova. (2024). Foreign Policy of the Are Under President Abdel Fattah El-Sisi (2013 2020). *The USA Journals*, 06, 134–141.

<https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume06Issue11-15>

- Kandil, A. (2024). *Profound, Trusted and A “Win-Win” Formula? How Egypt Views Its Relationship With China* [Research Article]. Friedrich-Ebert-Stiftung Project. Retrieved 2025, from <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/zypern/21842.pdf>
- Kaura, V. (2024). Expansion of BRICS. *Indian Journal of Asian Affairs*, 37, 165 - 172. Retrieved 2025, from <https://www.jstor.org/stable/27359403>
- Khodary, Y. F. Y. E., Selmey, M. G. S. G., & Elsayed, E. F. E. M. (2024). The impact of Egypt's accession to the BRICS group on the foreign exchange crisis in Egypt. *arXiv preprint arXiv:2412.16927*.
- Kirton, J., & Larionova, M. (2022). The First Fifteen Years of the BRICS1. *International Organisations Research Journal*, 17. doi:10.17323/1996-7845-2022-02-01
- Kumar, R. (2011). *Research Methodology* (3rd ed.). Sage Publications.
- Lilienthal, G., Ahmad, N., Awoke, B. S., & Elfakharani, A. M.A. (2023). The Blue Nile and its Watercourse Through Ethiopia into Sudan and Egypt: A Paradigmatic Shift in Water Rights, An Analytical Overview. *Tulane Environmental Law Journal*, 36, 7 - 42. Retrieved 2025, from <https://www.jstor.org/stable/27250867>
- Mansour, I., & Baiche, A. (2025). The impact of BRICS expansion on rivalries in West Asia and North Africa. *Asian Review of Political Economy*, 4, 2 - 22. <https://doi.org/10.1007/s44216-025-00052-w>
- Mansour, T. (2024). *Egypt's BRICS membership officially activated under Russian leadership*. The New Arab. Retrieved 2025, from <https://www.newarab.com/news/egypts-brics-membership-officially-activated>
- Megre, M., & Ribeiro, G. C. (2024). BRICS and Multipolar World. *Journal of International Relations and Sustainable Development*, 126 - 135. Retrieved 2025, from <https://www.jstor.org/stable/48761185>
- Nach, M., & Ncwadi, R. (2024). BRICS economic integration: Prospects and challenges. *South African Journal of International Affairs*, 31, 151 -166. DOI: 10.1080/10220461.2024.2380676
- Neumann, W. L. (2014). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- Nuruzzaman, M. (2020). Why BRICS Is No Threat to the Post-war Liberal World Order. *International Studies*, 1 - 16. DOI: 10.1177/0020881719884449
- Özekin, M. K., & Sune, E. (2023). Contesting Hegemony: The Rise of BRICS and the Crisis

- of US-led Western Hegemony in the MENA Region. *The Korean Journal of International Studies*, 21, 409 - 446. The Korean Journal of International Studies Vol.21 <https://doi.org/10.14731/kjis.2023.12.21.3.409>
- Patrick, S. (2025, March 31). *BRICS Expansion and the Future of World Order: Perspectives from Member States, Partners, and Aspirants*. Carnegie Endowment for International Peace. Retrieved December 19, 2025, from <https://carnegieendowment.org/research/2025/03/brics-expansion-and-the-future-of-world-order-perspectives-from-member-states-partners-and-aspirants?lang=en>
- Pennaforte, C. P., & Santos, M. J. d. S. (2024). EGYPTIAN FOREIGN POLICY UNDER AL--SISI GOVERNMENT: PATHS TO DIVERSIFICATION OF PARTNERSHIPS. *Brazilian Journal of African Studies*, 9, 39 - 60. <https://doi.org/10.22456/2448-3923.144853>
- Souto, M., & Villamil, E. (2025, May 2). *BRICS GDP outperforms global average, accounts for 40% of world economy*. Brics. Retrieved December 20, 2025, from <https://brics.br/en/news/brics-gdp-outperforms-global-average-accounts-for-40-of-world-economy>
- Selim, G. M. (2022). Egyptian foreign policy after the 2011 revolution: the dynamics of continuity and change. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 49, 1 - 22. DOI: 10.1080/13530194.2020.1747983
- Siddiqui, D. K. (2024). *The BRICS Expansion and the End of Western Economic and Geopolitical Dominance* [Research]. Retrieved 2025, from https://www.researchgate.net/profile/Kalim-Siddiqui/publication/385378847_2024_The_BRICS_Expansion_and_the_End_of_Western_Economic_and_Geopolitical_Dominance_-_World_Financial_Review/links/6722272277f274616d522548/2024-The-BRICS-Expansion-and-the-End-of-We
- Snidal, Duncan. "Rational Choice and International Relations." *Handbook of International Relations*, SAGE Publications Ltd, 2013, pp. 85 - 104. Accessed 2025.
- Wang, L., Zhang, Y., & Xi, H. (2022). The Political Economy of China's Rising Role in the BRICS: Strategies and Instruments of the Chinese Way. *The Chinese Economy*, 55. DOI: 10.1080/10971475.2021.1972545
- Xie, B. (2025). BRICS Expansion: Inviting Egypt from the Perspective of South-South Cooperation and Comparative Advantage Theory. *Proceedings of ICILLP 2025*

Symposium: Property Law and Blockchain Applications in International Law and Legal Policy, 115 - 120. DOI: 10.54254/2753-7048/2025.LD28601

Yefet, B., & Lavie, L. (2021). Legitimation in post- revolutionary Egypt: Al- Sisi and the renewal of authoritarianism. *Digest of Middle East Studies*. DOI: 10.1111/dome.12244

Zhongxiu, Z., & Qingxin, L. (2020). Promoting BRICS Cooperation for Economic Growth and Development. *revista tempo do mundo*, 40 - 57. <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13441>